

Bersama Lestarikan Hutan Tropis

JAKARTA — Masih ada persepsi keliru dalam pelestarian hutan tropis yang berhubungan dengan perubahan iklim. Sejauh ini, hanya pemilik hutan tropis dianggap bertanggung jawab dalam hal perubahan iklim.

Padahal, menurut tenaga ahli Menteri Kehutanan Bidang Strategi dan Politik Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Boen M Purnama, negara maju punya tanggung jawab yang sama sesuai prinsip penanganan perubahan iklim. "Setiap negara punya tanggung jawab yang sama dengan beban yang berbeda," ujarnya setelah membuka *Workshop* "Komunikasi Stakeholder tentang Penanganan Perubahan Iklim" di Jakarta, Kamis (14/6).

Mantan presiden United Nations Forum on Forest (UNFF) ini menyatakan, secara moral negara maju justru punya tanggung jawab yang lebih besar karena menghasilkan emisi lebih

besar dari kegiatan industri dan transportasi. Namun, langkah-langkah negara maju untuk memangkas emisinya belum signifikan.

Selain itu, kata Boen, realisasi komitmen negara maju untuk membantu mencegah deforestasi dan degradasi hutan juga masih rendah. Pendanaan jasa lingkungan lewat mekanisme *payment for environmental services* (PES) dari negara maju ke negara berkembang — pemilik hutan — masih sangat minim.

Padahal, Indonesia sudah melakukan tindakan nyata terkait mitigasi perubahan iklim. Salah satunya mendorong penerapan skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Penerapan REDD+ di Indonesia terlihat dari penurunan jumlah laju deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 450 ribu hektare (ha) per tahun pas-

capembentukan kabinet bersatu tahun 2009 jilid II. Selain itu, penerapan moratorium izin pemanfaatan hutan primer dan gambut yang sudah berlangsung satu tahun sejak dikeluarkannya Inpres No 10 Tahun 2011.

Untuk mewujudkan program itu, wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Aceh sukses menjadi proyek percontohan perkembangan REDD+. Hanya saja, tindakan Indonesia belum banyak dilihat dunia internasional karena minimnya publikasi.

Boen menyebut, pengelolaan hutan rakyat yang menjunjung prinsip kelestarian di sejumlah daerah bisa menjadi andalan Indonesia untuk dipamerkan ke forum internasional. Contohnya, hutan rakyat di Gunung Kidul dan Wonogiri yang sudah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari merupakan salah satu contoh yang dilakukan Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim.

an iklim.

Namun, Boen mengakui, upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia belum optimal. Menurut dia, desentralisasi pemerintahan yang kini diterapkan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.

Daniel Murdiyarso dari Center For International Forestry Research (CIFOR) menambahkan, REDD+ belum berkembang dan berhasil. Hambatannya? Rendahnya kemampuan kepemimpinan. Di daerah dan lembaga lingkungan diperlukan sosok pemimpin yang mempunyai kredibilitas dan otoritas legitimasi serta lembaga yang diakui dan mampu mengembangkan dan menggerakkan program itu. "Selama ini, banyak lembaga yang diakui tapi tidak mampu, atau sebaliknya mampu tapi tidak diakui. Kita harus punya kedua-duanya agar REDD+ berkembang," tegasnya.